

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Tahun 2002, terdapat 189 negara sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan konsep yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu target dari MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan pada tahun 2015. Program MDGs berhasil mengeluarkan 700 juta penduduk dunia dari kemiskinan ekstrem termasuk di negara berkembang, sehingga berdampak pada meningkatnya kesehatan melalui ketersediaan akses terhadap air bersih serta kemajuan pendidikan (Ishatono Raharjo, 2016)

Konsep penanggulangan MDGs terjadi perubahan secara mendasar dari MDGs menjadi konsep yang disebut dengan SDGs dari tahun 2015 hingga tahun 2030. SDGs merupakan target yang dibuat oleh negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan secara berkelanjutan terutama dalam program pengentasan kemiskinan di negara berkembang.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Hal tersebut diwujudkan dengan terciptanya kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Lahinya program SDGs untuk negara Indonesia dan negara berkembang lainnya diharapkan dapat menanggulangi permasalahan pokok seperti kemiskinan dan kelaparan, peningkatkan distribusi pendapatan yang merata, munculnya pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, keterjangkauan energi, pekerjaan yang layak, dan juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2004)

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Akan tetapi program tersebut harus dikaji dan bersamaan dengan program pembangunan nasional yang berbasiskan pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezagia, 2018)

Konteks permasalahan kemiskinan menjadi sebuah topik yang hangat untuk dibahas. Pada masa orde baru, pengentasan kemiskinan merupakan program pokok pemerintah selain program percepatan pertumbuhan ekonomi. Terhitung sejak 1982 pemerintah berupaya melakukan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan investasi (Ramdani, 2015). Dengan dibukanya lapangan pekerjaan dapat mengurangi pengangguran, sehingga diharapkan naiknya pendapatan yang berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sesuatu hal yang menarik untuk dibahas, bagaimana pertumbuhan itu dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada saat ini sebagian besar outlook dari pertumbuhan itu hanya menjelaskan kinerja outcome dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, tanpa melihat dampak dari kesejahteraan masyarakat. Sebuah permasalahan akan muncul apabila ekonomi tumbuh tetapi tidak diiringi dengan naiknya kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan berdampak kepada kualitas kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dapat dicerminkan melalui kemiskinan .

Trickle down effect adalah salah satu teori yang membahas dampak dari pertumbuhan ekonomi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Arthur Lewis dan diperluas secara mendalam oleh Ranis dan fei (1968). Seluruh negara berkembang menjadikan topik (*Least Develop Countries/LDCs*) sebagai literatur topik mengenai pembangunan ekonomipada tahun 1950 sampai tahun 1960. Teori *trickle-down effect* menjelaskan sekelompok masyarakat yang memperoleh kemajuan pada sektor pembangunan ekonomi akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada masyarakat yang dibawahnya, sehingga dapat menciptakan peluang kerja serta berbagai peluang ekonomi yang pada hasilnya akan menciptakan kondisi pendistribusian pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut memberikan

efek bias bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengikuti aliran secara vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin secara sendirinya.

Penduduk kaya akan merasakan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yang lebih besar dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi dibawahnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil.

Pertumbuhan ekonomi harus memiliki dampak secara vertikal dan memiliki keberpihakan kepada kaum miskin (*pro-poor growth*), artinya pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat keharusan dalam mengurangi kemiskinan (*necessary condition*) dan memiliki sifat kecukupannya (*sufficient condition*) dimana pertumbuhan ekonomi dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Secara langsung, kedua hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi dapat menyebar disetiap golongan pendapatan masyarakat termasuk kepada masyarakat miskin (*growth with equity*). Pertumbuhan ekonomi perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk masyarakat miskin banyak bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, berarti diperlukan peran kebijakan pemerintah yang cukup efektif dalam redistribusi manfaat pertumbuhan secara merata.

Secara empiris kesuksesan negara dikawasan asia timur pada tahun 1980-an dalam membuktikan pengaruh pertumbuhan yang berbasiskan pengentasan kemiskinan yang dikombinasikan dengan rendahnya ketimpangan pendapatan secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat dalam penelitian oleh (Cord, 2003). Penelitian lainnya juga dilakukan di Indonesia oleh (Laksani, 2010) hasil yang diperoleh mengidentifikasi bahwa selama tahun 1980-2008 penelitian ini membagi pertumbuhan menjadi 2 periode, orde baru dan reformasi pada tahun 2000, Dengan berdasarkan Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pembagian 3 periode dari tahun 1980 sampai tahun 2008 menunjukan bahwa

pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia telah bersifat pro terhadap kemiskinan (*pro poor growth*)

Penelitian lainya juga dilakukan di Indonesia oleh (Muthia, 2018) dalam penelitiannya identifikasi *pro poor growth* ketimpangan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil analisis data panel melalui index PPGI diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah pro terhadap kemiskinan namun demikian elastisitasnya masih terlalu kecil, hasil pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan masih terlalu cenderung rendah, akan tetapi PDRB yang dihasilkan setiap provinsi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, disuatu sisi pengangguran yang cenderung mengalami kenaikan dan tingkat ketimpangan masih dalam keadaan sedang, meskipun begitu untuk variabel ipm, pendidikan dan kesehatan semakin membaik ditandai dengan naiknya kualitas ipm masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun di semua provinsi di Indonesia.

Penelitian lainya juga dilakukan di negara Vietnam yang berhasil mempertahankan konsep *trickle down* selama 30 tahun, oleh (Pham, 2018) dalam penelitiannya di Vietnam mengenai pengaruh ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dalam indeks PPGI menggunakan data gini rasio dan kemiskinan dari survei standar hidup rumah tangga Vietnam yaitu vlss dan vhlss. Mengungkapkan bahwa dalam kebijakan ekonomi negara Vietnam selama tahun 1990-2008, mengambil tunjangan kemiskinan dan memberikanya kepada masyarakat miskin, dengan hasil adanya pengaruh terhadap efektivitas kegiatan ekonomi dikalangan masyarakat miskin, akan tetapi ini membuat pengeluaran dari pemerintah Vietnam menjadi tinggi. Kebijakan yang mulai dirubah pada awal tahun 2000 ketika negara Vietnam mulai memasukan kebijakan pengentasan kemiskinan didalam kebijakan pertumbuhannya dan berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Vietnam mengalami kenaikan dan memiliki indeks *pro poor* yang tinggi.

Terkait dengan permasalahan kemiskinan, banyak negara berkembang telah menjadikan konsep pertumbuhan dengan pengentasan kemiskinan (*pro poor growth*) dimana kebijakan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi haruslah berbasis pengentasan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan

permasalahan yang multikompleks yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang pada akhirnya juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Ayub, 2018).

1.2 Perumusan Masalah

Pro-poor growth menjadi tujuan dalam dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam banyak negara khususnya pada negara yang sedang berkembang. Saat ini Indonesia sekarang telah menerapkan konsep *pro-poor* dalam pertumbuhan ekonomi yang disepakati dalam RPJP nasional 2005 – 2025. Dalam kesepakatan tersebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diiringi dengan rendahnya ketimpangan dan akan berdampak terhadap turunya tingkat kemiskinan.

Konteks permasalahan kemiskinan, untuk kasus di Indonesia jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi penurunan angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir, pada tahun 2010 berada pada 31.02 juta jiwa penduduk miskin, dan pada tahun selanjutnya sebanyak 30.02 juta jiwa, atau bisa dibilang berkurang sebanyak 1 juta jiwa atau 0.8%, penurunan tersebut masih terus berlanjut dengan tren positif pada angka 27 juta jiwa di tahun 2014. Pada tahun 2017 kemiskinan cenderung mengalami kenaikan secara fluktuatif sebesar 27.77 persen, atau naik 0.7 persen dari tahun 2016 dengan presentase sebesar 10.64%, walaupun begitu tingkat kemiskinan setelahnya cenderung mengalami penurunan sampai pada tahun 2018 dan 2019 yang sesuai dengan target pemerintah kemiskinan turun menjadi dibawah 10% tepatnya diangka 9.22% atau 24.79 juta jiwa.

Data empiris menunjukkan bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia di beberapa provinsi mengalami pertumbuhan yang cukup baik, akan tetapi sangat keterbalikan dengan data kemiskinan yang cenderung tinggi, disuatu sisi ada sebagian provinsi yang pertumbuhan yang sedang akan tetapi memiliki persentase kemiskinan yang rendah sehingga menjadi sebuah permasalahan ketika ekonomi tumbuh tetapi tidak diiringi dengan naiknya welfare masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diambil dari data bps menampilkan bahwa provinsi sulawesi tengah tingkat pertumbuhan pada awal tahun 2012 menyentuh angka 9.53 persen dan terus berlanjut pada tahun tahun berikutnya

dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stagnan berada pada angka diatas 6 persen per tahun walaupun demikian angka kemiskinanya cenderung tinggi berada pada angka 14.09% pada tahun 2012 dan terus mengalami penurunan secara lambat dengan presentase kemiskinan yang cenderung tinggi pada angka rata 13%, padatahun 2015 dan 2019 tingkat kemiskinan masih berada diatas angka kemiskinan nasional sebanyak 11%. Untuk kasus ini tidak hanya dialami oleh provinsi sulawesi tengah saja, akan tetapi juga didapati pada provinsi lain, seperti gorontalo, lampung , DIY jogjakarta, jawa tengah dan sebagian provinsi di daerah pulau sulawesi dan timur Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berpihak kepada kaum miskin (*pro poor*) sehingga dapat mendorong penurunan angka kemiskinan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat dinamika pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ?
2. Apakah terdapat dinamika pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ?
3. Apakah terdapat pengaruh faktor sosiodemografi terhadap kemiskinan di Indonesia ?
4. Apakah pertumbuhan di indonesia sudah berada pada kondisi *pro poor* ?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana faktor dinamika pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi kemiskinan antar provinsi di Indonesia
2. Menganalisis sejauh mana faktor dinamika ketimpangan pendapatan dalam mempengaruhi kemiskinan antar provinsi di Indonesia
3. Menganalisis sejauh mana faktor sosiodemografi dalam mempengaruhi kemiskinan di Indonesia
4. Menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada pada kondisi *pro poor*

1.4 Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini mengkaji dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini ditujukan pada 33 provinsi di Indonesia, menggunakan data tingkat kemiskinan, PDRB provinsi dan Gini Ratio yang bersumber dari terbitan dari BPS (Badan Pusat Statistik).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diolah, dianalisis dan di proses menggunakan dasar-dasar teori pendukung untuk mempelajari pengujian hipotesis. Sehingga hasil penelitian dapat diperoleh dan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut



